

Aksi Bersih Kali Dendeng Jadi Gerakan Bersama Wujudkan Kota Kupang Bersih dan Bebas Sampah

Kupang, nwartapedia.com – Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II bersama Pemerintah Kota Kupang menggelar aksi bersih-bersih Kali Dendeng di Kelurahan Kuanino, Kota Kupang, Selasa (26/5/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari gerakan bersama menjaga kebersihan sungai demi terciptanya lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang, Hengky Malelak, S.STP., M.Si, yang mewakili Wali Kota Kupang. Dalam sambutannya, Hengky menyampaikan apresiasi kepada BBWS Nusa Tenggara II atas komitmennya menjaga kebersihan sungai di Kota Kupang.

“Atas nama Pemerintah Kota Kupang, kami menyampaikan terima kasih kepada BBWS Nusa Tenggara II yang terus menunjukkan kepedulian dalam menjaga sungai-sungai di Kota Kupang. Ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi bentuk nyata kepedulian terhadap lingkungan,” ujar Hengky.

Ia mengatakan, pada Tahun Anggaran 2026, BBWS Nusa Tenggara II melaksanakan pemeliharaan pada empat ruas sungai dan 20 titik pembersihan di Kota Kupang. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi langkah penting dalam mengurangi pencemaran sekaligus membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan.

Hengky menegaskan bahwa sungai memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat sehingga tidak boleh dijadikan tempat

pembuangan sampah.

“Sungai adalah urat nadi kehidupan kota. Dari sungai air mengalir dan kehidupan tumbuh. Jika sungai rusak, maka masa depan kita juga ikut terancam,” katanya.

Ia juga menyoroti dampak sampah terhadap kehidupan nelayan di Kota Kupang.

Menurutnya, pencemaran yang terbawa hingga ke laut menyebabkan nelayan harus melaut lebih jauh untuk mendapatkan ikan sehingga biaya operasional mereka meningkat.

Karena itu, Hengky mengajak masyarakat untuk mulai peduli terhadap kebersihan lingkungan dari hal-hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, terutama di sungai dan saluran air.

“Jangan menunggu sungai kotor atau banjir baru kita peduli. Mari jadikan kebersihan sebagai budaya hidup kita sehari-hari,” ajaknya.

Sementara itu, Kepala BBWS Nusa Tenggara II, Parlinggoman Simanungkalit, ST., MPSDA, mengatakan Sungai Dendeng merupakan salah satu dari empat sungai strategis di Kota Kupang yang menjadi fokus pemeliharaan rutin oleh pihaknya.

Menurutnya, sungai tidak hanya berfungsi sebagai saluran drainase, tetapi juga menjadi bagian penting dalam sistem tata kelola lingkungan perkotaan.

“Kalau sungai kita kelola dengan baik, maka sungai akan menjadi sumber kehidupan. Tetapi jika diabaikan, sungai juga bisa membawa dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, BBWS Nusa Tenggara II memiliki kewenangan melakukan pemeliharaan dan normalisasi sungai, namun upaya tersebut membutuhkan dukungan semua pihak agar hasilnya

lebih maksimal.

Parlinggoman juga menyoroti pentingnya pengendalian sampah dan limbah domestik yang masuk ke sungai karena berdampak langsung terhadap pencemaran laut dan menurunnya hasil tangkapan nelayan.

“Kita harus memastikan sungai tetap bersih terutama menjelang musim hujan agar aliran air tetap lancar dan tidak menyebabkan banjir,” ujarnya.

Selain aksi bersih sungai, BBWS Nusa Tenggara II bersama Pemerintah Kota Kupang juga berencana melakukan penataan kawasan Kali Dendeng melalui sinergi pembangunan lintas sektor.

Kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kelestarian sungai serta mewujudkan Kota Kupang yang bersih, sehat, nyaman, dan berkelanjutan.

.Menanggapi keluhan warga, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Kupang, Matheus A.H.T. Maahury juga menyatakan komitmennya untuk menambah satu unit kontainer sampah di kawasan Sungai dendeng guna mendukung kebersihan lingkungan dan mengurangi pembuangan sampah sembarangan.

Kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai serta mewujudkan kota Kupang yang bersih sehat nyaman dan berkelanjutan. (MI)

Revi Adiana Silawati Resmi Dilantik sebagai Direktur Kepatuhan Bank NTT Periode 2026-2031

Kupang, nwartapedia.com – , nwartapedia.com – Revi Adiana Silawati resmi dilantik sebagai Direktur Kepatuhan Bank NTT masa bakti 2026-2031 oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, dalam acara pelantikan yang berlangsung di Aula Fernandes Kantor Gubernur NTT, Selasa (26/5/2026).

Pelantikan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan Dewan Komisaris PT Flobamor dan PT Kawasan Industri Bolok masa bakti 2026-2030, serta Direksi PT Flobamor dan PT Kawasan Industri Bolok masa bakti 2026-2031.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur NTT, sejumlah bupati dari berbagai kabupaten di Provinsi NTT, Wakil Bupati Kupang, Sekretaris Daerah Kota Kupang, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, serta berbagai unsur pimpinan daerah dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Hari ini bukan hanya hari pelantikan, tetapi juga hari di mana negara melalui Pemerintah Provinsi NTT memberikan kepercayaan kepada bapak dan ibu untuk memimpin, mengawasi, menata, dan membawa BUMD ke arah yang lebih sehat, produktif, serta berdampak,” ujar Gubernur.

Menurutnya, jabatan di lingkungan BUMD merupakan amanah sekaligus ruang pengabdian untuk menunjukkan integritas, profesionalitas, serta menghadirkan perubahan yang positif bagi pembangunan daerah.

Secara khusus, Gubernur Melki menaruh harapan besar kepada Revi Adiana Silawati yang memiliki pengalaman sekitar 30 tahun di dunia perbankan melalui Bank Jatim.

“Dengan pengalaman 30 tahun di Bank Jatim, saya mengharapkan Ibu Revi untuk betul-betul bersama Direksi dan Komisaris Bank NTT memastikan Bank NTT bisa benar-benar menjalankan tugas sebagai jantungnya ekonomi NTT,” tegasnya.

Gubernur meyakini pengalaman dan kompetensi yang dimiliki Revi akan menjadi modal penting dalam memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan kepatuhan, serta mendukung pertumbuhan Bank NTT ke depan.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Direksi dan Komisaris Bank NTT dalam menjalankan berbagai program strategis yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

“Sinergi ini penting agar pada akhirnya memastikan bahwa Bank NTT bisa menjadi rumah bagi UMKM, bagi nelayan, bagi petani, bagi ASN serta seluruh masyarakat NTT,” ungkap Gubernur.

Dengan dilantikannya Revi Adiana Silawati sebagai Direktur Kepatuhan, diharapkan Bank NTT semakin memperkuat tata kelola perusahaan yang baik, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperluas kontribusinya dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

RUPS Bank NTT 2026 Hasilkan Sejumlah Keputusan Strategis, Gubernur Melki Optimistis Bank NTT Tumbuh Sehat

Kupang, nwartapedia.com – PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025 dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Tahun 2026 di Aula Fernandez Kantor Gubernur NTT, Minggu (24/5/2026).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, dan dihadiri para bupati serta wali kota se-Provinsi NTT bersama pihak Bank Jatim.

Dalam keterangannya kepada awak media usai pelaksanaan RUPS, Gubernur Melki mengungkapkan bahwa rapat berlangsung konstruktif dan menghasilkan sejumlah keputusan strategis untuk memperkuat kelembagaan serta meningkatkan kontribusi Bank NTT terhadap pembangunan daerah.

“Melalui diskusi rapat yang produktif ini kita optimis dan saya yakin perkembangan Bank NTT akan jauh lebih baik lagi dan terus bertumbuh sehat. Tadi juga kami mengecek rencana bisnisnya, rencana pencapaian keuntungan di tahun ini dan juga tahun-tahun ke depan yang dipaparkan dengan terbuka juga oleh direksi dan komisaris Bank NTT,” ujar Gubernur Melki.

Ia menjelaskan, para kepala daerah turut melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai parameter kinerja Bank NTT, mulai dari aset, pengembangan bisnis hingga Capital Adequacy Ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal.

“Secara umum, RUPS tahunan tadi berlangsung konstruktif, dan

dialognya memang sangat bagus. Kami mengecek betul satu per satu parameter dari Bank NTT, baik dari segi aset, pengembangan bisnis, dari segi CAR dan sebagainya. Kami semua kepala daerah sudah berkomitmen juga untuk bersama-sama membesarkan Bank NTT dan semakin berkontribusi untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat di berbagai bidang," tambahnya.

Dalam forum tersebut juga diputuskan perubahan struktur direksi dan komisaris Bank NTT. Sesuai rekomendasi dan konsultasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), struktur yang sebelumnya terdiri dari tujuh direksi dan lima komisaris kini kembali menjadi lima direksi dan tiga komisaris.

Selain itu, RUPS menyetujui penetapan Direktur Kepatuhan baru Bank NTT, yakni Revi Adiana Silawati yang berasal dari Bank Jatim dan telah memperoleh persetujuan OJK.

Gubernur Melki menyebut, Revi Adiana Silawati memiliki pengalaman selama 30 tahun di Bank Jatim dan dijadwalkan dilantik pada Selasa (26/5/2026) mendatang menggantikan Chris Adoe.

Tidak hanya itu, forum RUPS juga menyetujui pengusulan calon komisaris independen baru Bank NTT, yakni Flourie Rita Wuisan.

Salah satu keputusan penting lainnya yakni persetujuan perubahan status PT Bank NTT menjadi Bank NTT Persero sesuai rekomendasi Kementerian Dalam Negeri serta hasil konsultasi bersama Pemerintah Provinsi NTT dan DPRD NTT.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Melki juga mengungkapkan adanya tambahan penyertaan modal dari sejumlah pemerintah daerah. Kabupaten Malaka menambah modal sebesar Rp5 miliar, Kabupaten Alor Rp3 miliar, dan Pemerintah Provinsi NTT sebesar Rp30 miliar.

“Tadi juga kami menyepakati adanya penambahan modal, baik itu dari Kabupaten Malaka tambah Rp5 miliar, Kabupaten Alor Rp3 miliar, dan Pemerintah Provinsi Rp30 miliar,” jelasnya.

Sementara itu, terkait penguatan sektor ekonomi masyarakat, Gubernur Melki menjelaskan bahwa saat ini Bank NTT telah memiliki Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp350 miliar yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Dana tersebut terdiri dari Rp50 miliar untuk pekerja migran Indonesia dan Rp300 miliar untuk sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

“Saat ini kita sudah punya KUR senilai Rp350 miliar, yang terbagi untuk pekerja migran Rp50 miliar dan Rp300 miliar untuk UMKM. Saya mengajak masyarakat untuk memanfaatkan KUR Bank NTT ini dengan baik,” pungkasnya (MI)

Dirut Bank NTT Charlie Paulus Pastikan Penyaluran KUR Kembali Berjalan Awal Juni 2026

Kupang, nwartapedia.com – Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, memastikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kembali dijalankan mulai awal Juni 2026.

Hal tersebut disampaikannya usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku dan RUPS Luar Biasa Tahun Buku 2026 yang berlangsung di Kantor Gubernur NTT, Minggu (24/5/2026).

Kepada awak media, Charlie Paulus menjelaskan bahwa kenaikan

suku bunga turut memengaruhi dana pihak ketiga di Bank NTT.

Meski demikian, pembagian dividen kepada para pemegang saham tetap dilakukan sesuai porsi kepemilikan saham masing-masing.

“Kurang lebih sekitar Rp151 miliar yang dibagi kepada para pemegang saham sesuai porsi sahamnya,” ujarnya.

Ia mengatakan, Bank NTT saat ini juga memiliki cadangan modal yang cukup kuat, yakni mencapai Rp449 miliar.

Sebagian dana tersebut telah digunakan untuk mendukung kesiapan operasional program KUR yang kembali diaktifkan tahun ini.

Menurut Charlie, proses penyaluran KUR saat ini tinggal menunggu penyelesaian koneksi sistem dengan Departemen Keuangan.

Ia menyebut sejak 2019 Bank NTT sempat berhenti menjalankan program KUR sehingga perlu melakukan pendaftaran dan penyesuaian sistem kembali.

“Semua sudah beres, tinggal koneksi sistem komputer saja dengan Departemen Keuangan. Mudah-mudahan akhir bulan ini sudah bisa dijalankan dan awal Juni sudah mulai berjalan,” jelasnya.

Charlie menegaskan bahwa Bank NTT akan lebih selektif dalam menyalurkan KUR agar pengalaman kredit macet di masa lalu tidak kembali terulang.

Ia mengakui penghentian KUR sebelumnya dipicu tingginya angka kredit bermasalah.

“Dulu kredit macetnya terlalu banyak. Itu menjadi pengalaman pahit bagi kami, sehingga sekarang sistemnya diperbaiki dan penyalurannya lebih selektif,” katanya.

Ia menjelaskan, terdapat dua jenis KUR yang akan dijalankan, yakni KUR mikro tanpa agunan dengan plafon hingga Rp100 juta tanpa agunan dan KUR kecil plafon hingga 500 juta membutuhkan agunan.

Program tersebut, lanjut Charlie, akan difokuskan pada sektor-sektor usaha produktif seperti pertanian, peternakan, produksi telur, dan berbagai usaha rakyat kecil lainnya yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“KUR ini tidak boleh dipakai untuk konsumtif. Fokusnya usaha produktif yang nyata dan benar-benar berjalan,” tegasnya.

Terkait banyaknya calon peminjam KUR yang terkendala riwayat kredit di OJK akibat pinjaman online maupun kredit bermasalah sebelumnya, Charlie mengatakan pihak bank tetap membuka ruang penilaian secara selektif.

“OJK sebenarnya tidak melarang orang dengan riwayat kredit kurang baik untuk mendapat pinjaman. Tetapi bank tentu harus berhati-hati. Kalau sebelumnya bermasalah namun sekarang sudah baik, itu tetap menjadi pertimbangan bagi kami,” pungkasnya. (MI)

BRI Peduli Salurkan Beasiswa untuk 59 Mahasiswa UNIKA Weetebula di Sumba Barat Daya

Sumba Barat Daya, nwartapedia – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui Program BRI Peduli kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di daerah melalui

penyaluran bantuan beasiswa kepada mahasiswa Universitas Katolik Weetebula, Kabupaten Sumba Barat Daya.

Penyerahan beasiswa berlangsung pada Selasa (12/5/2026) di Aula UNIKA Weetebula. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Pjs Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia Waikabubak, Raimond Lukito Widiatmo, kepada Rektor UNIKA Dr. Wilhelmus Yape Kii, S.Pt., M.Phill., M.A. Kegiatan tersebut turut disaksikan oleh Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bonnu Wulla.

Dalam program tersebut, sebanyak 59 mahasiswa menerima bantuan beasiswa masing-masing sebesar Rp5 juta.

Penerima terdiri dari 10 mahasiswa kategori berprestasi dan 49 mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Para mahasiswa penerima berasal dari semester 2, 4, dan 6.

Pjs Pemimpin Cabang BRI Waikabubak Raimond Lukito Widiatmo mengatakan bahwa Program BRI Peduli Beasiswa merupakan bentuk nyata kepedulian BRI terhadap dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Sumba Barat Daya.

“Program BRI Peduli Beasiswa ini merupakan wujud nyata komitmen BRI dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan SDM, khususnya bagi generasi muda di Kabupaten Sumba Barat Daya. Kami berharap bantuan ini dapat menjadi penyemangat bagi mahasiswa untuk terus belajar, berprestasi, dan menyiapkan diri menjadi generasi unggul yang berintegritas serta mampu memberikan kontribusi positif bagi daerah maupun bangsa,” ujarnya.

Sementara itu, Rektor UNIKA Weetebula Dr. Wilhelmus Yape Kii menyampaikan apresiasi kepada BRI atas dukungan yang diberikan kepada mahasiswa UNIKA. Ia menjelaskan bahwa para penerima beasiswa merupakan hasil seleksi ketat dari total 112 mahasiswa yang mendaftar dan sebagian besar berasal dari keluarga kurang mampu.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada BRI atas dukungan yang diberikan kepada mahasiswa UNIKA. Semoga kerja sama yang baik ini dapat terus terjalin dan memberikan manfaat yang semakin luas bagi dunia pendidikan,” ungkapnya.

Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bonnu Wulla juga menyambut baik dukungan BRI terhadap sektor pendidikan di wilayahnya. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan BRI Peduli, Bank Rakyat Indonesia terus berupaya menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat, termasuk dalam mendukung akses pendidikan yang lebih baik bagi generasi muda Indonesia. *

Dinas Pertanian Kota Kupang Bahas Standar Pelayanan Publik untuk Tingkatkan Kualitas Layanan Pertanian

Kupang, nwartapedia.com – Dinas Pertanian Kota Kupang terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyusunan Standar Pelayanan Publik yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pelayanan teknis di bidang pertanian.

Sekretaris Dinas Pertanian Kota Kupang, Marthina O. Ratoe Oedjoe, mewakili Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang, Matheus A.B.H. Da Costa, menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan

yang berlangsung di Kupang, Jumat (22/5/2026).

Ia menjelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas pemerintahan yang baik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan yang jelas dan terukur.

Menurutnya, Dinas Pertanian Kota Kupang sebagai perangkat daerah teknis yang menyelenggarakan pelayanan publik melalui Bidang Peternakan, Bidang Veteriner, serta Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian perlu menetapkan standar pelayanan bagi petani, kelompok tani, peternak, pengusaha ternak, hingga Rumah Potong Hewan (RPH).

“Standar pelayanan ini penting agar seluruh proses pelayanan teknis kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan kepastian pelayanan,” ujarnya.

Sebagai langkah penyusunan standar pelayanan tersebut, pada 21 Mei 2026 Dinas Pertanian Kota Kupang menggelar forum pembahasan draf Standar Pelayanan Publik yang berlangsung di Aula Dinas Pertanian Kota Kupang.

Kegiatan itu menghadirkan berbagai unsur terkait, di antaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, masyarakat pemanfaat layanan,

Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Orta) Sekretariat Daerah Kota Kupang, serta bidang-bidang teknis di lingkup Dinas Pertanian Kota Kupang.

Forum tersebut menjadi wadah diskusi bersama untuk menyempurnakan draf standar pelayanan sehingga nantinya dapat menjadi pedoman resmi dalam pelaksanaan pelayanan publik di sektor pertanian dan peternakan di Kota Kupang.

Melalui penyusunan standar pelayanan ini, Dinas Pertanian Kota Kupang berharap pelayanan kepada masyarakat dapat semakin profesional, akuntabel, serta mampu menjawab

kebutuhan masyarakat di bidang pertanian dan peternakan secara optimal. (MI)

Dinas Pertanian Kota Kupang Intensifkan Pengawasan Pemotongan Babi untuk Cegah ASF dan Lindungi Kesehatan Masyarakat

Kupang, [nwartapedia.com](https://www.nwartapedia.com) – Dinas Pertanian Kota Kupang melalui Bidang Veteriner meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pemotongan babi di luar Rumah Potong Hewan (RPH) resmi sebagai langkah pencegahan penyebaran African Swine Fever (ASF) yang saat ini mulai berkembang di sejumlah daerah.

Sebagai penanggung jawab operasional pemotongan hewan, khususnya di RPH Oeba, Bidang Veteriner melakukan pemantauan, pengawasan, serta pembinaan kepada lapak dan kios penjual daging babi di Kota Kupang.

Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang, Matheus A.B.H. Da Costa, S.Sos, M.Si menjelaskan bahwa pengawasan ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi dini terhadap penyebaran ASF sekaligus memastikan daging babi yang beredar di masyarakat tetap aman dikonsumsi.

“Pemerintah terus melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha pemotongan babi agar proses pemotongan dilakukan di RPH resmi yang telah memenuhi standar kesehatan

hewan dan sanitasi. Langkah ini penting untuk mencegah penyebaran ASF serta menjaga keamanan pangan bagi masyarakat,” jelas Matheus..

Untuk memaksimalkan pengawasan, dinas membentuk empat tim yang akan bertugas di enam kecamatan dan 17 kelurahan di Kota Kupang. Pengawasan tersebut direncanakan berlangsung rutin setiap minggu.

<https://nwartapedia.com/wp-content/uploads/2026/05/VID-20260522-WA0053-1.mp4>

Selain melakukan pembinaan kepada pedagang dan pelaku usaha, dinas juga tetap menyiapkan tim khusus untuk memantau aktivitas pemotongan di RPH Oeba dan RPH Bimoku guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar kesehatan hewan dan sanitasi.

Pemerintah berharap seluruh pelaku usaha pemotongan babi dapat melakukan proses pemotongan di fasilitas resmi yang telah disediakan sehingga kualitas daging yang beredar tetap aman dan layak konsumsi.

Dalam kegiatan tersebut, pendekatan yang dilakukan masih mengedepankan pembinaan dan edukasi kepada para pedagang.

Namun apabila masih ditemukan pelanggaran atau pelaku usaha yang tidak mengindahkan aturan, maka akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Langkah pengawasan rutin ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keamanan pangan, melindungi kesehatan masyarakat, serta mencegah penyebaran penyakit ASF yang dapat merugikan peternak dan masyarakat luas di Kota Kupang. *

Bobby Lianto Temui Dirijen Internasional Asal Kupang di Belanda, Bukti Putra NTT Mampu Bersaing di Eropa

Kupang, nwartapedia.com – Perjalanan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi NTT, Bobby Lianto, selama berada di Eropa tidak hanya difokuskan pada promosi potensi daerah dan produk UMKM asal NTT, tetapi juga memperkuat jejaring dengan diaspora asal Nusa Tenggara Timur yang sukses di luar negeri.

Dalam agenda kunjungannya, Bobby Lianto turut bertemu para lulusan KADIN NTT Institute yang mengikuti program Ausbildung di Eropa, sekaligus melakukan pertemuan dengan pihak KBRI setempat guna membangun peluang kerja sama dan pengembangan sumber daya manusia asal NTT.

Salah satu momen menarik dalam perjalanan tersebut adalah saat Bobby Lianto bertemu sahabat lamanya semasa SMP, yakni Antonius Dody Soetanto, yang kini dikenal sebagai konduktor dan dirijen internasional di Belanda.

Pertemuan berlangsung hangat di Utrecht, Belanda. Bobby mengaku bangga melihat putra asal Kupang mampu menorehkan prestasi di panggung musik internasional dan membawa nama Indonesia, khususnya NTT, di Eropa.

Dody Soetanto lahir di Kupang dan menempuh pendidikan di SD Don Bosco IV Kupang, SMP Frater Kupang, lalu melanjutkan pendidikan di SMAK Santo Yusuf Malang.

Ia kemudian kuliah di Universitas Katolik Parahyangan Bandung sebelum melanjutkan pendidikan master seni musik di The Conservatory of Utrecht, Belanda.

Saat ini, Dody dikenal sebagai konduktor dan bariton yang aktif memimpin berbagai paduan suara dan ansambel vokal di Belanda.

Ia merupakan pendiri sekaligus direktur artistik VOKALISK, ansambel vokal yang beranggotakan 16 penyanyi dari berbagai wilayah di Belanda.

Selain itu, Dody juga berafiliasi dengan Groot Concertkoor Amsterdam (GCA), Leids Kamerkoor (LKK), serta Vrije Universiteit Koor (VUkoor). Kiprahnya di dunia musik internasional semakin dikenal setelah tampil dalam Opera Forward Festival 2025 di Amsterdam yang diselenggarakan De Nationale Opera & Ballet.

Dalam festival tersebut, Dody memimpin VUkoor pada pertunjukan perdana opera baru bertajuk "CODES".

Ia juga terlibat dalam berbagai kolaborasi orkestra besar, termasuk memimpin persiapan paduan suara untuk pertunjukan Simfoni Kedua Mahler bersama Groot Concertkoor Amsterdam dan Het Orkest Amsterdam di Concertgebouw Amsterdam. *

Lokakarya CAPACities 2026 Ditutup, Kota Kupang Siapkan Langkah Cepat Hadapi Dampak Perubahan Iklim

Kupang, [nwartapedia.com](https://www.nwartapedia.com) – Pemerintah Kota Kupang bersama Catholic Relief Services (CRS) resmi menutup Lokakarya Rencana Kerja Tahunan Program CAPACities Climate Action

Partnership in Asian Cities Tahun 2026 di Hotel Neo Aston Kupang, Kamis (21/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi forum strategis dalam menyusun langkah bersama menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin dirasakan masyarakat Kota Kupang.

Penutupan lokakarya dilakukan oleh Kepala Bappeda Kota Kupang, Andre Otta.

Kepada media ini, Andre Otta menegaskan bahwa hasil pembahasan selama kegiatan akan menjadi dasar dalam penyusunan program prioritas perubahan iklim di Kota Kupang.

Menurut Andre, dampak perubahan iklim kini tidak hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan, tetapi juga menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah hingga ancaman bencana alam.

Ia mencontohkan bencana Siklon Seroja yang pernah melanda Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu dampak nyata perubahan iklim yang harus diantisipasi secara serius.

“Perubahan iklim ini membawa dampak luas, mulai dari air bersih, sanitasi, sampah hingga ancaman bencana. Karena itu pemerintah harus memperkuat langkah mitigasi dan kesiapsiagaan,” ujarnya.

Dalam lokakarya tersebut, Pemerintah Kota Kupang bersama para mitra menyepakati beberapa langkah prioritas yang akan segera dijalankan.

Salah satunya adalah pembangunan sistem peringatan dini atau early warning system bagi wilayah pesisir.

Program tersebut diharapkan mampu memberikan informasi cepat kepada masyarakat nelayan dan warga pesisir terkait potensi cuaca ekstrem, gelombang tinggi maupun ancaman kenaikan air laut.

Selain itu, pemerintah juga menyoroti pentingnya penguatan sistem penanganan pengaduan masyarakat agar pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif dan responsif.

Andre mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam penanganan laporan masyarakat akibat belum optimalnya integrasi antara teknologi dan tata kelola sumber daya manusia.

“Teknologi penting, tetapi tetap harus dibarengi dengan penguatan SDM. Karena pada akhirnya semua pelayanan dijalankan oleh manusia sehingga penyelesaian masalah masyarakat bisa lebih maksimal,” jelasnya.

Ia juga menyoroti tingginya kepadatan penduduk di beberapa wilayah Kota Kupang yang berdampak pada meningkatnya persoalan sampah, sanitasi dan kebutuhan air bersih.

Menurutnya, Pemerintah Kota Kupang tengah menyiapkan pembahasan lanjutan terkait regulasi dan dukungan anggaran untuk memperkuat program mitigasi perubahan iklim hingga tingkat kelurahan.

Bahkan, kata Andre, terdapat wacana mengalokasikan sebagian anggaran pembangunan kelurahan untuk mendukung program penanganan dampak perubahan iklim, termasuk sanitasi dan akses air bersih bagi masyarakat rentan.

Sementara itu, Program Manager CAPACities Indonesia dari Catholic Relief Services (CRS), Fransiska Sugi, mengatakan lokakarya tersebut merupakan agenda tahunan yang mempertemukan pemerintah daerah dengan Kelompok Kerja Perubahan Iklim Kota Kupang.

Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan memastikan sinergi program antara pemerintah dan CRS berjalan efektif, realistis dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kegiatan ini untuk memastikan program pemerintah dan CRS

berjalan selaras sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” kata Fransiska.

Ia menjelaskan terdapat tiga fokus utama dalam kemitraan tersebut, yakni penguatan kolaborasi, kebijakan yang inklusif dan akuntabel, serta penguatan komunikasi dan informasi iklim.

Fransiska menilai dampak perubahan iklim di Kota Kupang semakin terasa dalam beberapa tahun terakhir, terutama melalui perubahan pola musim, peningkatan suhu udara, ancaman longsor, angin kencang hingga persoalan krisis air bersih.

Menurutnya, hampir seluruh wilayah Kota Kupang memiliki tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim dengan karakteristik persoalan yang berbeda antara kawasan pesisir, wilayah padat penduduk dan daerah dataran tinggi.

“Perubahan iklim itu dampaknya memang perlahan, tetapi kalau tidak diantisipasi sejak sekarang maka risikonya akan semakin besar di masa mendatang,” pungkasnya. (MI)

Pemkot Kupang dan CRS Perkuat Strategi Adaptasi Iklim Lewat Lokakarya CAPACities 2026

Kupang, [nwartapedia.com](https://www.nwartapedia.com) – Pemerintah Kota Kupang bersama Catholic Relief Services (CRS) menggelar Lokakarya Rencana Kerja Tahunan Program CAPACities Climate Action Partnership in Asian Cities di Hotel Neo Aston Kupang, Kamis (21/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi forum strategis dalam memperkuat kerja sama lintas sektor untuk menghadapi dampak perubahan iklim dan risiko bencana di Kota Kupang.

Lokakarya dibuka oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Kupang, Daud Novianus Nafi, mewakili Wali Kota Kupang.

Daud Nafi kepala media ini menegaskan bahwa kemitraan antara CRS dan Pemerintah Kota Kupang telah berjalan cukup lama dan memberikan kontribusi dalam mendukung program penanganan perubahan iklim.

Menurutnya, penyusunan rencana kerja tahunan melalui Program CAPACities bertujuan menyelaraskan kebutuhan pemerintah daerah dengan program yang dijalankan CRS agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Melalui kerja sama ini, pemerintah daerah bisa membangun sinergi dengan berbagai pihak untuk melakukan mitigasi perubahan iklim. Program yang dijalankan nantinya diharapkan mampu membantu masyarakat menghadapi risiko perubahan iklim secara bertahap,” katanya.

Ia menjelaskan, pembahasan dalam lokakarya juga menitikberatkan pada penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat dalam merancang program adaptasi iklim berbasis kebutuhan wilayah.

Pada sesi materi, Sekretaris Dinas Sosial Kota Kupang, Gabriel Meo Wio, SP, memaparkan tentang relevansi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dalam mendukung adaptasi perubahan iklim di Kota Kupang.

Menurut Gabriel, Dinas Sosial memiliki tanggung jawab dalam perlindungan kelompok rentan seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, dan masyarakat terdampak bencana.

“Dinas Sosial hadir melalui Kampung Siaga Bencana dan Taruna

Siaga Bencana (Tagana) untuk membantu masyarakat ketika terjadi bencana, termasuk penyaluran bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Dinas Sosial juga terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui program peningkatan kemampuan keluarga dan kesejahteraan sosial di tingkat kelurahan.

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Kupang, Elsje W. A. Sjoen, S.Sos., M.Si, menjelaskan bahwa berdasarkan kajian risiko bencana, Kota Kupang memiliki potensi terhadap 10 jenis bencana.

Jenis bencana tersebut meliputi kekeringan, cuaca ekstrem, banjir, longsor, banjir bandang, gelombang ekstrem, abrasi pantai, gempa bumi, tsunami, hingga wabah penyakit.

“BPBD terus melakukan sosialisasi kesiapsiagaan dan pelayanan informasi rawan bencana kepada masyarakat di enam kecamatan di Kota Kupang,” jelasnya.

Ia menambahkan, BPBD memiliki fungsi koordinasi, pelaksanaan, dan komando dalam penanganan bencana, termasuk pendataan warga terdampak, distribusi bantuan, dan penanganan pascabencana.

Dalam kegiatan tersebut juga dibahas pentingnya penguatan pelayanan standar minimal kebencanaan melalui edukasi masyarakat, penyediaan air bersih di kawasan rawan bencana, serta peningkatan kapasitas warga dalam menghadapi kondisi darurat.

Melalui Lokakarya CAPACities 2026 ini, Pemerintah Kota Kupang berharap terbangun kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat guna menciptakan kota yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim dan ancaman bencana. (MI)